

**PENGARUH PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
TERHADAP TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA DESA
SEBAMBAN LAMA KECAMATAN SEI LOBAN**

**Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin**

Abstrak: Anggaran Dana Desa ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Adapun tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui dan juga menganalisa pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Di Desa Sebamban Lama Kecamatan Sei Loban. Penelitian ini menggunakan metode analisa data kuantitatif, Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat eksplanasi ilmu dapat digolongkan pada jenis penelitian kausalitas yaitu penelitian yang ingin mencari penjelasan dalam bentuk hubungan sebab akibat (*cause- effect*) antar beberapa konsep atau beberapa variable atau beberapa strategi yang dikembangkan dalam manajemen dan diarahkan untuk menggambarkan adanya sebab akibat antara beberapa situasi yang digambarkan dalam variable, dan atas dasar itu ditariklah sebuah kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Transparansi Pengelolaan Keuangan. Artinya semakin baik Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan maka semakin tinggi pula Transparansi Pengelolaan Keuangan. Hubungan perangkat desa dan masyarakat yaitu ketika masyarakat memberikan kepercayaan dalam mengelola keuangan desa dan aktivitas desa lainnya. Oleh sebabnya, pihak perangkat desa di tuntun agar selalu transparan dalam melaksanakan aktivitas desa salah satunya yaitu dalam pengelolaan keuangan desa. Karena ini merupakan tanggungjawab pemerintah sehingga masyarakat dapat menilai kinerja itu sendiri

Kata Kunci: Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa, Transparansi Pengelolaan Keuangan

Abstract: This Village Fund Budget must of course be followed by clear arrangements regarding all matters regarding the village fund itself. The purpose of this study is to determine and also analyze the effect of Supervision of the Village Consultative Body on Financial Management Transparency in Sebampan Lama Village, Sei Loban District. This research uses quantitative data analysis methods. This type of research is included in the type of research that is explanatory in nature, it can be classified in the type of causality research, namely research that wants to find an explanation in the form of a cause-effect relationship between several concepts or several variables or several strategies. developed in management and directed to describe the cause and effect between several situations described in the variable, and on the basis of which a conclusion is drawn. The results showed that the Village Consultative Body Supervision had a significant effect on the dependent variable of Financial Management Transparency. This means that the better the supervision of the Village Consultative Body provided, the higher the Transparency of Financial Management. The relationship between village officials and the community is when the community gives trust in managing village finances and other village activities. Therefore, village officials are guided to always be transparent in carrying out village activities, one of which is in managing village finances. Because this is the responsibility of the government so that the community can assess the performance itself

Keywords: Supervision of the Village Consultative Body, Financial Management Transparency

DAFTAR PUSTAKA

- A Arens, A., J Elder, R., & S Beasley, M. (2016). Audit dan Pelayanan Verifikasi. In Jakarta : Erlangga
- Abdul, M. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Aswaja pressindo.
- Alam, Heldi Vanni. 2017. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa. Gorontalo: Ideas Publishing.
- Aprinto, SPHR. Brian dan Fonny Arisandy Jacob. 2013. Pedoman Lengkap Profesional SDM Indonesia. PPM: Jakarta
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa. Jurnal Akuntansi Aktual. Vol. 6 No. 2
- Hariandja, Marihat Tua Efendi, (2002). Manajemen Sumber Daya Manusia, Grasindo. Jakarta.
- Ghozali, I. Latan, H. (2012). Partial Least Square : Konsep, Teknik, dan Aplikasi Smart PLS 2.0 M3. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Dalam Negeri. (2014). Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta Kementerian Dalam Negeri. (2018).
- Mardiasmo. (2002). Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi.

- Peraturan menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Jakarta
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan Ke19. Bandung:
CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi.
Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Sutrisno, Edy. 2014. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Ke-6. Jakarta: Kencana
Prenada Media Group.
- Tahir, Arifin. 2011. Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pustaka
Indonesia Press. Jakarta. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah
- Wahyuddin. (2016). Implementasi kebijakan alokasi dana desa di desa Ako Kecamatan
Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. e Jurnal Katalogis, volume 4 Nomor 5, Mei
2016
- Widodo, (2001). Implementasi Kebijakan. Bandung, CV Pustaka Belajar.